

POLISI WANITA (POLWAN) DI SUMATERA BARAT (1948-2013) SUATU STUDI HISTORIS KOMPARATIF

Revi Handayani

STKIP PESSEL

Email: revihandayani09@gmail.com

Abstract

This paper aims to know the policewomen histories which are part of the Indonesian National Police institution and the role of policewomen in the Indonesian National Police institution. This paper also described the recruitment, the education, and the challenges to become a policewoman in 1948 then the writer observed the changes in 2013. This paper had used the historical research methods that were the heuristics (data collection), the criticism sources (external and internal), the interpretation (analysis) and the historiography. In this paper, the writer used the sources from the library research and the archives. Apart from the written sources, the writer also obtained the data through the oral sources by interviewing the people who knew about the assignment, the career, the recruitment of the policewomen in West Sumatra. In this paper, the writer found the presence of women as the policewomen had a positive impact on the police. Research can represent gender equality and the existence of women as public servants who are usually identical to men, even though in reality there is a dichotomy between women and men. This study provides a general conclusion that the current gender problems that occur for women in 2013 are very concerned, this can be seen from the increasing acts of violence against women, overcoming this problem. Policewomen are here to face the problem. However, the idea of the emergence of Polwan aims to minimize violence against women and provide comfort to women who are involved in crime. If victims of crime, namely women, must be examined or searched by men, it will provide inconvenience and vulnerability to abuse, then the Policewoman is here. As the zeitgeist and the increasingly massive voicing of policewomen's gender equality become a profession that is no longer taboo, Policewomen are present in the Police to give a gentle impression and energy and far from the impression of violence.

Keywords: Gender, Policewomen, Comparative History.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Polwan yang merupakan bagian dari sebuah institusi Polri dan Peranan Polwan pada institusi Polri. Menjelaskan bagaimana perekrutan, pendidikan dan tantangannya menjadi Polwan dimulai pada tahun 1948 dan melihat perubahan yang terjadi pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (ekstern dan intern), interpretasi (analisis) dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari penelitian perpustakaan, arsip. Selain sumber tertulis, data juga didapat melalui sumber lisan, yaitu mewawancarai orang-orang yang mengetahui tentang tugas, karir, perekrutan Polwan di Sumatera Barat. Pada penelitian ini menemukan bahwa kehadiran perempuan sebagai Polwan memberikan dampak yang sangat positif bagi kepolisian. Penelitian bisa mewakili kesetaraan gender dan eksistensi perempuan sebagai pelayan publik yang biasanya identik dengan laki-laki, meskipun secara pada realnya ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki.

Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan umum bahwa pemasalahan gender yang terjadi terhadap perempuan saat sekarang ini pada tahun 2013 memang sangat memprihatikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, mengatasi hal itu Polwan hadir untuk menghadapi permasalahan tersebut. Namun, ide kemunculan Polwan bertujuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan memberikan kenyamanan kepada perempuan yang tersangkut tindak kejahatan. Jika korban tindak kejahatan yaitu perempuan harus diperiksa atau digeledah oleh laki-laki akan memberikan ketidaknyamanan dan rentan akan pelecehan, maka Polwan hadir disini. Seiring zeitgeist dan semakin masifnya penyuaran akan kesetaraan gender polwan menjadi suatu profesi yang tidak lagi tabu selain itu Polwan hadir di Kepolisian untuk memberikan suatu kesan dan energi yang lembut serta jauh dari kesan kekerasan.

Kata Kunci : Gender, Polwan, Historis Komparatif.

Pendahuluan

Keikutsertaan perempuan dalam perjuangan membantu kaum laki-laki jauh sudah dimulai ketika pada perang kemerdekaan di Sumatera Barat tahun 1942. Hal itu bisa dilihat dengan bergabungnya perempuan-perempuan dalam organisasi yang bertujuan untuk membantu laki-laki dalam perjuangan, misalnya perempuan yang tergabung dalam Layskar Muslimin, Sabil Muslimat, Keputrian Republik Indonesia (KRI), Puteri Ksatria dan lain-lain. Mereka semua yang ikut membantu di barisan depan maupun di barisan belakang untuk menyiapkan makanan di dapur.¹

Selain tergabung pada laskar rakyat perempuan juga sudah ada tergabung dalam kepolisian. Bergabungnya perempuan pada kepolisian yang mana, juga mempunyai tujuan yang awalnya hanya untuk ikut membantu kaum laki-laki pada lingkup pekerjaan yang memerlukan bantuan pemeriksaan pada sesama jenis. Perempuan yang tergabung dalam lingkup kepolisian disebut dengan Polwan (Polisi Wanita). Secara teori munculnya Polwan di Sumatera Barat tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1948 di Bukittinggi. Hal itu sangat menarik dari sejarah Kepolisian Sumatera Barat. Menariknya hal tersebut dikarenakan, perannya menjadi peletak pondasi sejarah lahirnya Polwan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Ide kemunculan Polwan memang sudah dimulai beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, namun hal itu belum bisa untuk direalisasikan. Baru pada tahun 1948 keinginan tersebut terwujud. Kelahiran Polwan juga tidak terlepas dari keinginan organisasi perempuan Islam di Bukittinggi. Organisasi itu menyadari adanya kesulitan yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap perempuan yang menjadi tersangka kejahatan, saksi, maupun korban. Organisasi Islam tersebut berinisiatif mengajukan usulan untuk mendidik wanita-wanita pilihan tersebut untuk menjadi polisi.²

Keinginan Organisasi Perempuan Islam tersebut mendapat sambutan baik dari Kepolisian RI Sumatera Barat. Berhubung karena mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Mereka mencoba mengintruksikan untuk mendirikan pendidikan Polwan di setiap Keresidenan di Indonesia. Organisasi Perempuan Islam tersebut adalah organisasi Aisyiah yaitu organisasi perempuan dari persyarikatan Muhammadiyah.³ Tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1948 diterima 12 orang calon Polwan dan setelah seleksi yang lulus ada 6 orang yaitu, Nelly Pauna, Mariana Saanin, Rosnalia Taher, Djasmaniar, dan Rosmalina, dengan pangkat Kolonel Polisi dan Dahniar dengan pangkat Letnan Kolonel.⁴ Mereka merupakan enam orang yang diterima untuk pertama kalinya dalam penerimaan Calon Kader Kepolisian untuk tingkat perwira yang dilaksanakan di Bukittinggi.⁵ Wanita tersebut merupakan lulusan sekolah MULO (*Meer Uitgebroid Lager Onderwijs*), yang kemudian dilakukan latihan pendidikan oleh Kepolisian yang ada di Bukittinggi.⁶

Mereka yang diterima lulus sebagai Polwan mengikuti pendidikan dan latihan selama kurang lebih enam bulan lamanya. Selain itu mereka juga banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak. Tantangan yang paling berat adalah sindiran yang cukup berat yang melecehkan pribadi seorang wanita yang mengatakan “mereka tersesat di dunia laki-laki”. Adanya pandangan yang seperti itu merupakan hal yang umum di tengah masyarakat.

Pada umumnya Masyarakat Minangkabau menganggap perempuan Minangkabau yang bekerja di luar rumah dianggap tabu, perempuan hanya boleh bekerja pada lingkungan domestik saja yaitu, pada seputar rumah, anak, dan kasur sementara di sektor publik adalah urusan laki-laki. Begitulah pandangan masyarakat yang merupakan sindiran tajam bagi pribadi seorang wanita.⁷

Salah satu yang menarik lagi adalah diperlukannya peran wanita dalam perjuangan sehingga melahirkan, ide kemunculan Polwan itu sendiri. Sementara dalam tatanan adat Minangkabau perempuan tidak boleh sama dengan laki-laki. Perempuan mempunyai posisi yang dimuliakan dalam

¹Maryetti, dkk. *Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang 1945-1950*. Padang: PD Intisar, tahun 1999, hal. 16-18.

²Hasril Caniogo, dkk. *Polisi Pejuang Polisi Masyarakat*. Padang : Yayasan Dialektika Minangkabau, 2006, hal. 84. Liha t juga Kharles, “Lahirnya Polisi Wanita Republik Indonesia dan Tantangannya pada Masa Revolusi Perjuangan di Sumatera Barat 1945-1948”, Seminar Indonesia-Malaysia, 2011, hal.8.

³Gusti Asnan. *Memkir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an*. Edisi 1; Jakarta :yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 44.

⁴Hasril Chaniago, dkk. *Op.Cit.*, hal.84.

⁵Fitriana Sidikah, dkk. *Wanita Berseragam: Sebuah Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Peranan Polisi Wanita*. Jakarta: Kemitraan, 2006, hal. 13.

⁶Hasril Chaniago, dkk. *Op.Cit.*, hal. 85.

⁷*Ibid.*

tatanan adat Minangkabau terkenal dalam petatah, petitihnya perempuan yakni sebagai “Bundo Kanduang”, sebagai *limpapeh rumah nan gadang*.⁸

Ternyata ada kepentingan keterlibatan perempuan di sini adalah menghadapi beberapa persoalan yang muncul menyangkut tahanan Jepang yaitu wanita dan anak-anak, karena pada saat ini tingkat kejahatan sangat memprihatinkan akibat situasi ekonomi yang belum stabil setelah ditinggalkan oleh Jepang. Banyak tindak kejahatan yang rawan dan korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sementara pada saat itu belum terpikirkan tentang sel khusus perempuan. Dalam mengatasi hal tersebut Kepolisian Sumatera Barat terpaksa harus menyediakan sel khusus perempuan, sehingga memerlukan bantuan dengan melibatkan pegawai sipil perempuan yang ada di lingkungan kepolisian.⁹

Adapun alasan lain penelitian ini karena Sumatera Barat menjadi pembuat tonggak sejarah bagi Kepolisian Indonesia. Terutama dalam perjalanannya yang membidani lahirnya Polwan Republik Indonesia, tidak bisa diabaikan begitu saja. Selanjutnya kehadiran Polisi Wanita sebagai sosok pemimpin di ranah publik, yang masih sangat bertentangan dengan lingkungan sosial dan budaya yang mana masih kuat dengan tradisi patriarkatnya.

Namun lain halnya jika melihat menjelang tahun 2013 banyak sekali fenomena-fenomena yang memberikan ruang berekspresi kepada Polwan yang secara bebas sudah tampil dan eksis dalam setiap keragaman budaya seni dan berbagai kegiatan. Suatu hal yang menjadikan Polwan tampil seperti selebriti dengan menampilkan berbagai kekhasan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan tidak lain demi menampilkan dan memberikan pelayanan yang lebih menarik bagi masyarakat. Agar hal demikian menampilkan sisi humanis dan positif bagi citra Polwan yang bekerja pada lingkup kepolisian.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari visi dan misi tugas yang saat ini diemban oleh institusi Polri. Polisi pada hakekatnya adalah sebagai penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat serta penjaga ketertiban. Polwan adalah bagian dari Korps Kepolisian RI, di mana tugas Polri diatur secara yuridis dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI No. 20 tahun 1982, bahwa kedudukan Polwan sebagai anggota Polri adalah sama atau sejajar dengan Polisi Laki-laki. Tidak ada perbedaan Namun hal itu jarang sekali ditemukan kalau Polwan piket atau jaga malam, tugas yang mendasar antara Polwan dengan Polisi Laki-laki. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan perbedaan itu tampak, Misalnya dalam pelaksanaan patroli malam, atau piket jaga malam. Polwan yang bekerja pada malam hari disebabkan karena adanya tersangka wanita dalam penyelidikan, membutuhkan Polwan.¹⁰ Memang tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan kalau Polwan tidak boleh piket atau jaga malam.¹¹ Sehubungan dengan perubahan waktu pada abad 21 ini telah berkembang pula tindak kejahatan yang berbau gender seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), narkoba, dan lain-lain, dan kasus tersebut banyak dialami oleh perempuan. Maka untuk mengatasi permasalahan yang demikian hanya mampu diwakili oleh seorang Polwan.

Persoalan perempuan di Minangkabau memang selalu menarik untuk ditulis, karena kondisi budaya dan lingkungan sangat kontradiktif dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dalam dunia kepolisian. Akan tetapi dari data yang diperoleh perekrutan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menerima perempuan menjadi polisi sangat minim jika dibandingkan jumlah penerimaan untuk polisi laki-laki, hal ini dapat dilihat dari laporan tahun ini triwulan II tahun 2013. Jumlah Polisi Wanita saat ini yang bertugas di Sumbar adalah sekitar 372 orang, sedangkan Polisi Laki-laki sebanyak 9202 orang. Tidak dipungkiri dominasi gender masih ditangan laki-laki. Padahal kalau kita membahas mengenai Polwan sebenarnya bukan pada masalah gender semata tetapi, secara spesifik Polwan ini adalah bagian dari sebuah institusi kepolisian yang mana posisinya tidak terpisah dari organisasi kepolisian.

Sebagai organisasi kepolisian mengharapkan profesionalisme kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Sumatera Barat. Profesionalisme kerja dalam organisasi inilah yang dirasakan pada pertimbangan gender tersebut, inilah yang sangat menarik untuk dikaji kedepan.¹²

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi ide kemunculan Polwan dalam sejarah Polri di Sumatera Barat?

⁸Hayati Nizar. *Bundo Kanduang Dalam Kajian Islam dan Budaya, PDIKM Sumatera Barat*. Cet. 1; Padang-Sumbar: Gunatama, 2004, hal. 97.

⁹Hasril Chaniago, dkk. *Op.Cit.*, hal. 84.

¹⁰Fitriana sidikah Rahman, dkk. *Op.Cit.*, hal. 18.

¹¹Aldri Frinadi Suhelmi Karim Tamin, dkk. “Polisi Wanita: Studi Kasus Polresta Padang”. UNP: Jurnal Humanus volume III. Tahun 2000, hal. 30.

¹²Fitriana Sidikah, dkk. *Op.Cit.*, hal. 16.

2. Apa saja bentuk keterlibatan perempuan dalam militer pada masa perang kemerdekaan?
3. Bagaimanakah bentuk sistem pendidikan yang dijalankan oleh seorang Polwan pada tahun 1948-2013?
4. Bagaimanakah tugas dan tantangan yang dihadapi oleh Polwan dalam tugasnya sebagai bagian dari suatu Institusi Polri di Sumatera Barat?

Metodologi

Metode dimulai dengan mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang berhubungan dengan penelitian. Sumber primer yang didapatkan, yaitu arsip-arsip berhubungan mengenai permasalahan Polwan di Sumatera Barat. Selain itu sumber juga didapatkan melalui penelitian perpustakaan Sumber primer penulisan ini berasal dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang relevan. Serta arsip-arsip tersebut baik yang tersimpan di Arsip Daerah Sumatera Barat, Arsip Nasional Republik Indonesia maupun perorangan. Arsip secara keseluruhan merupakan bahan-bahan penting sebagai pemberi informasi dasar tentang penelitian ini,¹³

Selain itu untuk menunjang data yang diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen, penulis juga mengadakan wawancara mendalam dilakukan antara lain dengan Orang-orang yang memiliki profesi Polwan, teman seperjuangan baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya sumber-sumber yang didapatkan melalui tahapan heuristik. Seterusnya akan diuji terlebih dahulu dengan dikritik. Kritik sumber yang terdiri dari dua macam kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern penting dilakukan guna mengetahui otensitas atau keaslian sumber dan perlu atau tidaknya untuk mendukung penulisan. Sedangkan kritik intern penting untuk menentukan apakah sumber yang digunakan kredibel, dapat dipercaya atau tidak. Interpretasi, adalah menafsirkan dan menyusun fakta-fakta sehingga menjadi keseluruhan yang masuk akal dan relevan dengan masalah yang diteliti. Di sini fakta disintesis dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Sehingga dapat dibaca dan dimengerti. Terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan kembali peristiwa sejarah, dalam tahap ini fakta yang sudah disintesis dan dianalisis. Harus dipaparkan dalam bentuk tulisan, dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran perempuan pada masa perjuangan mempunyai tempat yang istimewa, Banyak sekali tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh para perempuan selama ikut dalam perjuangan pada barisan depan. Mulai dari diperiksa dan kemudian selama 1 hari penuh tanpa diberi makan, diinterogasi dan dipaksa untuk memberitahukan di mana posisi tentara Republik. Keinginan untuk merdeka telah menghilangkan rasa takut ataupun gentar, dan menumbuhkan semangat juang serta rela berkorban dalam diri kaum perempuan pada waktu itu sehingga mereka ikut berjuang pada garis depan, ditengah suasana perang untuk mengobati tentara yang luka korban perang.¹⁴

Dampak yang ditimbulkan oleh perang dari keikutsertaan perempuan pada front pertempuran juga tidak dapat dipungkiri atau dihindari. Adapun dari mereka beberapa yang mengalami kejiwaan seperti anggota KRI (Palang Merah) akibat terlalu sering mengalami korban perang yang luka parah. Secara organisator keterlibatan perempuan dalam perang kemerdekaan di Sumatera Barat, dibagi atas dua kelompok yaitu Keputrian Indonesia (KRI) dan Sabil Muslimat. Selain, berbeda nama kedua organisasi pejuang ini juga relatif berbeda dalam struktur maupun dalam perjuangannya. KRI berada langsung dibawah TNI sedangkan Sabil Muslimat berada di bawah Muhammadiyah, yaitu Nasyiatul Aisyiah dan bekerja sama dengan laskar Hizbullah (organisasi ketentaraan Muhammadiyah untuk kaum pria).¹⁵

Pada kenyataan dewasa ini sangat berbeda, ini terlihat pada Permasalahan Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pembagian kerja berdasar gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan. Namun dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan di atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki

¹³William H. Frederick dan Soeri Soeroto (ed). *Pemahaman Sejarah Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1984, hal. 467.

¹⁴*Ibid.*, hal. 33-34.

¹⁵*Ibid.*, hal. 35-36.

lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Untuk lebih jelas dapat dibandingkan pada peran sosial, sifat kegiatan dan jenis pekerjaan.¹⁶

Persoalan ini berkembang sangat lama, misalnya dalam hal pendidikan perempuan selalu menjadi warga kelompok kelas dua. Persoalan itulah yang menyebabkan perempuan Minangkabau jauh tertinggal dari laki-laki. Sampai pada akhir abad ke 20, pendidikan dirasakan oleh kaum perempuan masih dirasakan minim. Sebut saja contohnya pelaku sejarah seorang tokoh pendidikan yaitu Rohana Kudus yang didaulat menjadi perempuan pendidikan di Sumatera Barat, mereka merasakan langsung betapa sulitnya duduk dibangku sekolah, hal ini disebabkan oleh nilai sosial yang mengekang gerak mereka, meskipun dalam tatanan adat di Minangkabau memberikan kedudukan sehingga memposisikan perempuan Minangkabau berada pada posisi yang terhormat. Namun, dalam kenyataan perempuan Minangkabau tetap berada di bawah kendali kaum laki-laki.¹⁷

Budaya patriarki inilah yang berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya, yang nampaknya sudah ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang *patriarkhal*. Dalam masyarakat, mereka (perempuan) menjadi the *second sex* (suatu konsep subordinasi yang terus-menerus dibangun oleh masyarakat patriarki, padahal Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluknya yang memiliki kelas kedua dan kehadirannya pun bukan semata-mata sebagai pelengkap laki-laki, sehingga pada akhirnya perempuan kurang memiliki akses untuk peningkatan kualitas hidupnya, seperti akses untuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya.¹⁸

Wanita Minangkabau sama halnya dengan wanita Indonesia lainnya, karena rentetan peristiwa yang sama, juga menerima dampak sejarah sosial yang sama. Namun, dalam hal ini terlihat bias gender di dalam budaya Minangkabau, yang walaupun tidak berlaku secara umum. Misalnya dalam hal pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh jenjang pendidikan tersebut. Sehingga timbul pameo dikalangan masyarakat awam bahwa “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya toh ke dapur juga”.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hasril Chaniago. Pada awal kemunculannya selama proses pendidikan dan latihan selain itu, Polwan juga banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak. Tantangan yang paling berat adalah sindiran yang cukup berat yang melecehkan pribadi seorang wanita adalah mengatakan “mereka tersesat di dunia laki-laki” adanya pandangan yang seperti itu merupakan hal yang umum di tengah masyarakat pada saat dilihat perempuan ikut serta menjadi Polwan untuk pertama kalinya. Mereka menganggap perempuan Minangkabau yang bekerja di luar rumah sangat dianggap tabu, karena anggapan umum masyarakat pada waktu itu perempuan hanya boleh bekerja pada lingkungan domestik saja yaitu pada seputar rumah, anak, dan kasur sementara di sektor publik adalah urusan laki-laki. Begitulah pandangan masyarakat, yang merupakan sindiran tajam bagi pribadi seorang wanita.¹⁹

Setelah itu perekrutan untuk tingkat Bintara baru dimulai kembali pada tahun 1979, dan dilakukan seterusnya sampai tahun 2013.²⁰ Perekrutan tenaga Polwan ini memang sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan perekrutan Polisi laki-laki. Walaupun dalam perekrutan mereka sama-sama diberikan kesempatan, baik Polisi laki-laki ataupun Polwan sama-sama menjadi bagian dalam lembaga kepolisian. Untuk seterusnya masih seperti itu, tenaga Polwan masih diberikan jumlah yang relatif sedikit dibanding polisi laki-laki.

Lihat saja pada tahun 2008-2013, dari semua pelamar, jumlah pelamar yang ada rata-rata tidak sampai 20 persen untuk Polwan yang lulus atau diterima yaitu sekitar 7,6 persen dalam setiap tahunnya. Penerimaan untuk tingkat Bintara pada tahun 2009 sebanyak 430 orang, dalam jumlah tersebut diberikan peluang kurang dari 10 persen dari jumlah polisi laki-laki untuk Polwan. Pada tahun 2009 lulus 383 orang, 20 orang yang lulus Polwan dan dari 363 polisi laki-laki.²¹ Penerimaan untuk tingkat Bintara pada tahun 2010, mendaftar sebanyak 74 orang, dalam jumlah

¹⁶Mufidah Ch. “Rekontruksi dan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama”, diunggah dari <http://pilnas.ristek.go.id/jurnal/index.php/browse/index/26>, pada tanggal 12 Juni 2014.

¹⁷Zusneli Zubir. *Dari Pingitan Hinga Karir: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Mendobrak Tradisi*, Yogyakarta:2011. hal. 6-7.

¹⁸Ari zuntriana. “Gender, Perempuan dan Budaya Patriarki”. FISIP: Universitas Airlangga Surabaya, artikel dalam internet, didownload dari <https://www.scribd.com/mobile/login?> pada tanggal 12 Juni 2014.

¹⁹Hasril Chaniago, dkk. *Brigadir Jenderal Polisi Kharoedin Datuk Rang Kayo Basa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 85.

²⁰Wawancara dengan AKBP Yuli Anwar tanggal 16 Juli 2013.

²¹Kep Kapolri No. Pol : Skep/49/II/2009 Tgl 4 Februari 2009 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2009.

tersebut diberikan 17 orang untuk Polwan dari 36 pelamar laki-laki yang lulus.²² Tahun 2011 yang mendaftar sebanyak 107 orang dan yang lulus untuk Polwan 9 orang dari 78 pelamar laki-laki.²³ Sedangkan untuk tahun 2012 yang mendaftar 85 orang, dan yang lulus untuk Polwan 6 orang dari 71 orang pelamar laki-laki.²⁴ Selanjutnya untuk tahun 2013 yang mendaftar 326 orang dan yang lulus 14 orang dan gugur 2 orang dari 308 pelamar laki-laki yang lulus.²⁵ Dari data tersebut, masih terdapat marginalisasi terhadap perempuan, persentasenya sangat timpang antara kesempatan yang diterima laki-laki dan perempuan. Tahun 2013 di Sumatera Barat terdapat 9202 orang Jumlah Polisi laki-laki yang masih dinas, Polwan yang masih dinas sebanyak 372 orang.²⁶

Upaya peningkatan kembali peluang Polwan mengikuti pendidikan sama dengan Polisi laki-laki untuk Tingkat Perwira baru dimulai kembali sejak tahun 2002. Mulai dengan melakukan perekrutan calon Perwira Polwan di AKPOL, pada bulan Desember 2005. Telah lulus sebanyak 31 Perwira Polwan dan dilantik untuk pertama kalinya sebagai lulusan AKPOL sebagai angkatan pertama. Pada perekrutan pertama perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi Polwan untuk tingkat Perwira. Perekrutan pertama ini merupakan langkah awal bagi Polri dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk pemenuhan tugas kepolisian yang semakin kompleks.²⁷ Baru untuk tingkat Perwira di tahun 2012 dilakukan lagi perekrutan tenaga wanita atau disebut Polwan dalam kepolisian atau disebut dengan Taruni AKPOL (Akademi Polisi) yang mana sebelumnya tidak ada penerimaan untuk perempuan pada tingkat perwira pada tahun sebelumnya.²⁸ Tahap yang dilalui pada sistem perekrutan untuk menjadi calon Polwan, itu sama halnya dengan persyaratan yang diajukan pada calon Polisi laki-laki. Kehadiran perempuan dalam Kepolisian sebagai Polwan, memberikan citra tersendiri dan menjadikan sebuah karakteristik yang unik bagi Kepolisian. Eksistensi itu sudah dapat dilihat seperti misalnya, Polwan yang tampil dalam beberapa pertunjukan-pertunjukan itu ialah, pertunjukan motor gede, dan fashion show, dan bahkan menjadi presenter televisi. Semua hal itu diupayakan demi memberikan citra positif dan sisi yang lebih humanis pada dunia kepolisian untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Sebuah eksistensi yang sangat lumrah dilakukan oleh seorang perempuan yang berprofesi sebagai Polwan pada abad 21 ini. Namun, lain halnya ketika awal berdiri tahun 1948, kemampuan Polwan masih diragukan oleh rekan laki-laki sesama Profesi, Seiring perjalanan waktu sudah mulai tampak ruang kepada perempuan untuk berekspresi secara bebas tanpa mengurangi segi positif dari kodratnya sebagai seorang perempuan.²⁹

Perekrutan perempuan pada institusi kepolisian sudah mulai rutin dilakukan dalam setiap tahunnya. Hingga tahun 2013 juga sudah ada Polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres. Dewasa ini adalah tantangan amat serius bagi Korps Polwan untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Profesi polisi, adalah profesi yang dekat dengan segala bentuk kekerasan. Perannya sebagai penegak hukum membuat polisi harus berhadapan langsung dengan pelanggar hukum, sehingga menuntut polisi harus bersifat tegas. Kondisi pekerjaan yang sangat terkesan maskulin, kasar dan keras, membuat sikap seorang Polwan harus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan tersebut. Di satu sisi Polwan harus bisa menonjolkan sikap tegas sebagai seorang polisi akan tetapi, disatu sisi lagi sebagai seorang perempuan harus tetap menonjolkan sifat feminimnya. Sehingga berada pada dua posisi antara maskulin dan feminim.³⁰

Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan kenakalan remaja, narkoba dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria. Bahkan di penghujung tahun 1998, sudah lima orang Polwan dipromosikan menduduki jabatan komando (sebagai Kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah 4 orang Polwan dinaikkan pangkatnya menjadi Perwira Tinggi berbintang satu. Polwan yang dinaikkan pangkatnya

²²Kep Kapolri No. Pol : Skep/18/I/2010 Tgl 15 Januari 2010 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2010.

²³Kep Kapolri No. Pol : Skep/06/I/2011 Tgl 4 Januari 2011 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2011

²⁴Kep Kapolri No. Pol : Skep/25/I/2013 Tgl 20 Januari 2012 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2012.

²⁵Kep Kapolri No. Pol : Skep/67/II/2013 Tgl 1 Februari 2013 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2013.

²⁶Polda Sumatera Barat. Data Rekap Anggota Polri Berdasarkan Pangkat, Laporan Tri Wulan Thp II, Padang, *Arsip*, Th 2013.

²⁷Sri Yulianingsih. *Op.Cit.*, hal. 2.

²⁸Wawancara dengan AKBP Bapak Choky Meliala tanggal 12 Juli 2013.

²⁹*Ibid.*

³⁰Fitriah Sidikah Rachman, dkk. *Op.Cit.*, hal. 39.

tersebut pada penghujung tahun 1998 mereka ialah, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dra. Roekmini Astoeti, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dra. Sri Kusmaryati, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Hj. Rumiah Karoredjo, S.Pd, dan Brigadir Jenderal Polisi Soepartiwi, M.Pd. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuanpun bisa bereksistensi sama hal dengan pria dalam lingkup pekerjaan yang sama.³¹

Pada tahun 2013 banyak wanita dan anak-anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan, sehingga tugas Polwan dibagi dalam berbagai macam bidangnya, misalnya untuk melakukan penyidikan itu adalah tugas Reserse dan Inteligen. Polwan merupakan bagian dari Korp Kepolisian RI, di mana tugasnya diatur secara yuridis di dalam UU No.13 tahun 1961, UU No 20 tahun 1982 yang berisi tentang pokok-pokok tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.³² Artinya dalam hal ini, adalah tugas yang dikerjakan oleh Polki dan Polwan adalah sama. Seperti yang dijelaskan dalam rincian UU tersebut adalah: a). sebagai alat Negara penengak hukum Polri mempunyai tugas untuk memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat, dan mewujudkan ketentraman masyarakat. b). sebagai pengayom masyarakat harus bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan perundang-undangan.

Kenyataan di lapanganpun sama tidak jauh berbeda. Fisik seorang wanita dan kodratnya yang berbeda dengan kaum laki-laki tidak menjadi halangan saat ini, dalam profesi pekerjaan sebagai Polwan. Sebagai seorang penengak hukum, tantangan yang paling berat itu adalah ketika seorang Polwan berhadapan dengan pelaku kejahatan dengan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki.³³ Bidang tugas dalam lingkup Kepolisian yang sama-sama dilakukan secara bersamaan oleh polisi laki-laki dan Polwan tersebut antara lain adalah: terdiri dari Inteligen, Reserse, Sabhara, Administrasi, Lalu Lintas, dan Bimmas.

Berdasarkan pertimbangan gender dalam hal ini, profesi menjadi seorang Polwan bukan lagi suatu tabu bagi seorang perempuan untuk sama-sama bekerja dengan laki-laki, atau berada pada sektor pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Pekerjaan menjadi seorang Polwan merupakan kebanggaan tersendiri bagi seorang perempuan untuk, mengenakan baju kebanggaannya yang membuat perempuan terkesan sangat macho (perempuan yang agak maskulin) dan berdaya tarik feminim. Hal tersebut menjadikan perempuan semakin menunjukkan eksistensi pada publik saat sekarang ini. Bisa kita lihat pada media massa yang menampilkan berbagai macam tayangan, yang memperlihatkan keindahan dan kelembutan seorang Polwan dalam balutan seragam yang berkesan Macho (antara maskulin dan feminim) dan tegas. Menjadikan profesi menjadi seorang Polwan adalah profesi idola oleh sebagian para perempuan saat ini. Sampai penghujung tahun 2013 dan awal tahun 2014 sudah ada pakaian seragam Polwan yang di *fashion show* pada acara televisi swasta. seperti pakaian seragam kerja, seragam dinas, seragam ketika di lapangan, dan seragam ketika acara-acara resmi.³⁴

Kesimpulan

Seiring dengan dikeluarkannya “Maklumat Pemerintah No X tahun 1945 yang berisi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemuda untuk mendirikan partai-partai politik”. Sejak itulah golongan dan aliran masyarakat berlomba-lomba mendirikan partai-partai. Sehubungan dengan hal itu kaum perempuanpun ikut serta membentuk organisasi wanita untuk dapat ikut serta membantu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan. Organisasi yang terbentuk adalah seperti Keputrian Republik Indonesia (KRI), Sabil Muslimat dan Putri Ksatria. Layskar Muslimin, dan lain sebagainya.

Selanjutnya sesudah Indonesia merdeka, banyak sekali tawanan pelarian akibat penjajahan jepang yang mana korbannya yang banyak dialami oleh perempuan. Muncullah keinginan untuk mengikutsertakan perempuan pada pemeriksaan. Sebenarnya ide kemunculan Polwan tidak terlepas dari sejarah kepolisian Khususnya Sumatera Barat. Awalnya ide kemunculan Polwan merupakan keinginan Organisasi Perempuan Islam di Bukittinggi, yang menginginkan agar perempuan tidak ikut diperiksa oleh laki-laki, karena mengingat Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan. dilihat tepatnya tanggal 1 September 1948 berdirilah Polwan di Bukittinggi dan itu adalah untuk

³¹Azzuralhi. “Polwan, Sosok Kartini Masa Kini” _ A SHORT JOURNEY diunggah dari <http://azzuralhi.wordpress.com>, pada tanggal 12 Juli 2014.

³²Wawancara dengan Bu Dewi Suryani pada tanggal 19 Agustus 2014.

³³Wawancara dengan Brigadir Reva Yenti, Pada Tanggal 19 Agustus 2014

³⁴Fitriana Sidikah Rahman, dkk. *Op. Cit.*, hal. 18.

pertama kalinya di Indonesia. Sejak itu muncullah Polwan atas jawaban dan keinginan Organisasi Islam Aisyiah tersebut.

Keikutsertaan Perempuan membantu kaum laki-laki maupun bekerja dalam lingkup yang sama, semasa awal berdirinya pada tahun 1948 merupakan suatu pandangan yang sangat tabu. Tanggapan masyarakat perempuan yang bekerja pada sektor pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki adalah hal yang sesat, akan tetapi pada abad 21 ini. Keikutsertaan perempuan dalam jajaran kepolisian diepresikan secara bebas.

Hal itu bisa dilihat dalam hal direkrutnya perempuan dalam jajaran Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Adapun alasan direkrutnya perempuan dalam jajaran kepolisian memang tidak jauh berbeda dengan latar belakang sejarah lahirnya Polwan di Sumatera Barat. Hal itu juga tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi yang mengharuskan, dan tuntutan yang memang membutuhkan keikutsertaan perempuan pada sektor kepolisian. Kebutuhan terutama dalam hal penanganan kasus tindakan kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Walaupun awalnya kehadiran Polwan diragukan karena merasa seorang perempuan tidak mungkin mampu bekerja seperti laki-laki, akan tetapi hal tersebut bisa terjawab pada tahun 2013 ini.

Hal ini dikarenakan Polwan adalah bagian dari Polri Korps Kepolisian RI, di mana tugas Polri diatur secara yuridis dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI No. 20 tahun 1982 bahwa Kedudukan polisi wanita sebagai anggota Polri adalah sama atau sejajar dengan polisi Laki-laki. Sehingga tidak ada perbedaan tugas yang mendasar antara Polwan dengan polisi laki-laki.

Alasan keikutsertaan ini juga bisa hal ini menunjukkan kalau perempuan juga mampu menunjukkan eksistensinya dalam sektor publik. Kehadiran perempuan sebagai Polwan memberikan dampak yang sangat positif bagi Kepolisian. Keikutsertaan perempuan di Kepolisian karena memang tidak bisa dipungkiri kehadiran perempuan dalam pekerjaan Sebagai Polwan memang sangat dibutuhkan oleh kepolisian. Sehubungan dengan hal itu dalam hal perekrutannya disesuaikan dengan kebijakan dari pusat kepolisian yang dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Selain itu kebutuhan akan hadirnya Polwan juga tidak terlepas dari berkembangnya tindak kejahatan pada menjelang tahun 2013 ini. Tindak kejahatan yang banyak menimpa kaum perempuan sebagai korban, pelaku dan saksi seperti pelecehan seksual, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penganiayaan anak di bawah umur.

Permasalahan yang muncul dari segi gender adalah karena masyarakat atau lingkungan sosial, sering melakukan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya pembagian kerja berdasarkan gender tidak menjadi permasalahan selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan. Realitas di masyarakat menimbulkan perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, yang akhirnya melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat. Di mana laki-laki lebih diunggulkan dari pada perempuan melalui konstruksi sosial. Pemasalahan gender yang terjadi terhadap perempuan saat sekarang ini memang sangat memprihatinkan sekali. Permasalahan tersebut banyak menimpa perempuan sebagai korban pelecehan. Oleh sebab itu Polwan hadir untuk menghadapi permasalahan tersebut. Untuk menangani permasalahan yang rentan terjadi terhadap perempuan, yaitu apabila korban tindak kejahatan yaitu perempuan harus diperiksa atau digeledah oleh laki-laki. Maka Polwan hadir di Kepolisian untuk memberikan nusa yang berbeda terhadap kepolisian. Nuansa yang lembut dan jauh dari kesan kekerasan namun, terkesan macho dan tegas.

Daftar Pustaka

Arsip

- Kapolda Sumatera Barat. "Data Rekap Anggota Polri Berdasarkan Pangkat" Laporan Tri Wulan Thp II, Padang, Th 2013.
- Kapolri. " Surat Keterangan Telegram Kapolri" nomor B/517/III/2013 Tanggal 15-03-2013 yang dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang
- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/538/XI/2007 Tgl 27 November 2007 tentang Penerimaan Bintara Polri TA.2008.
- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/49/II/2009 Tgl 4 Februari 2009 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2009.
- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/18/I/2010 Tgl 15 Januari 2010 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2010.
- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/06/I/2011 Tgl 4 Januari 2011 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2011

- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/25/I/2013 Tgl 20 Januari 2012 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2012.
- Kapolri. Kep Kapolri No. Pol :
Skep/67/II/2013 Tgl 1 Februari 2013 tentang penerimaan Brigadir Polisi TA.2013.

Buku & Artikel

- Badan Pemurnian Sejarah Indonesia
Minangkabau(B.P.S.I.M).“*Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950*”, Jilid I, Jakarta: 1978.
- Fitriana Sidikah Rachman, dkk. *Wanita Berseragam : Sebuah Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita*, Jakarta: Kermitraan. 2006.
- Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, edisi 1 tahun 2007.
- G. Ambar Wulan. *Polisi dan Politik : Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hasril Chaniago, dkk. *Brigadir Jenderal Polisi Kharoedin Datuk Rang Kayo Basa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- dkk. *Polisi pejuang Polisi Masyarakat*, Padang : Yayasan Dialektika Departement Pertahanan Keamanan Sejarah ABRI: Pusat Sejarah ABRI 1971.
- Kementrian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Tengah*, Padang: Jawatan Penerangan Sumatera tengah. Th.1953.
- Mestika zed, dkk. *Revolusi di Padang 1945-1950*, MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), Sumatera Barat: 1996.
- , Dkk. “*Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*”, Padang: Citra Budaya Indonesi, 2002.
- Direktorat Sejarah Mabes Polri. “*Perjuangan Polri di Sumatera Barat 1945-1949*”, Jakarta, 1987.
- Hayati Nizar. *Bundo Kanduang Dalam Kajian Islam dan Budaya*, PDIKM Sumatera Barat. Cet. 1; Padang-Sumbar: Gunatama, 200.
- Aldri Frinadi Suhelmi Karim Tamin, dkk. “Polisi Wanita: Studi Kasus Polresta Padang”. UNP: Jurnal Humanus volume III. Tahun 2000, hal. 30.
- Maryeti, dkk. *Peranan Kaum Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang tahun 1945-1950*, Padang: PD intisar.
- Mansoer Fakih. “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997.
- Kharles, “Lahirnya Polisi Wanita Republik Indonesia dan Tantangannya pada Masa Revolusi Perjuangan di Sumatera Barat 1945-1948”, Seminar Indonesia-Malaysia, 2011, hal.8.
- William H. Frederick dan Soeri Soeroto (ed). *Pemahaman Sejarah Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1984, hal. 467.
- Ari zuntriana. “Gender, Perempuan dan Budaya Patriaki”. FISIP: Universitas Airlangga Surabaya, artikel dalam internet, didownload dari
- Andri Frinaldi, dkk.”Polisi Wanita: Studi Kasus Polresta Padang”, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian UNP, dalam Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora Volume III. Tahun 2000.